

Kekuasaan Kehakiman Indonesia

Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.

Krakatauw Book

Kekuasaan Kehakiman Indonesia

Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.

Krakatauw Book

Kekuasaan Kehakiman Indonesia

Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.

ISBN 979-99402-5-4

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Penerbit

Krakatauw Book

Jakarta

Desain kulit muka dan tata letak
ATA Prints

Dicetak digital oleh ATA Prints
Isi di luar tanggung jawab percetakan

Kata Pengantar

Penulis bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Baik dan Penyayang yang telah memberikan kesehatan, hikmat dan waktu kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan buku ini di tengah-tengah kesibukan kerja dan studi yang sangat menyita waktu.

Buku ini ditulis untuk memenuhi permintaan mahasiswa dan untuk memenuhi kelangkaan buku-buku yang mengupas aspek-aspek Kekuasaan Kehakiman secara komprehensif yang dapat dijadikan buku pegangan oleh berbagai kalangan dalam berbagai aktivitas hukum praktis seperti hakim, pengacara maupun oleh mahasiswa fakultas hukum. Sekalipun ada beberapa buku yang mengupas mengenai masalah kekuasaan kehakiman sebagai salah satu cabang kekuasaan negara tetapi buku-buku tersebut tidak memenuhi kebutuhan karena pembahasannya yang bersifat parsial.

Sebagai suatu karya ilmiah tentu saja buku ini tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Sebab, seperti kata pepatah, tak ada gading yang tak retak. Untuk itu penulis menyambut dengan tangan terbuka segala kritik dan saran untuk perbaikan buku ini. Akhir kata, mudah-mudahan pada waktu yang akan datang, penulis dapat memperbaiki segala kekurangan dalam buku ini.

Jakarta, Juli 2006

P e n u l i s

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Bab 1 Sejarah Perkembangan Kekuasaan Judisial Sebagai Salah Satu Cabang Kekuasaan Negara	1
Masa Pemerintahan Kerajaan dengan Kekuasaan Raja yang Absolut	1
Perkembangan Ruang Lingkup Tugas atau Fungsi Kekuasaan Judikatif	11
Bab 2 Sifat Hakikat Kekuasaan Judisial Sebagai Cabang Kekuasaan Negara Yang Merdeka	20
Asas Kekuasaan Kehakiman sebagai Kekuasaan Negara yang Merdeka	20
Batas-batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman	27
Faktor-Faktor yang Dapat Memengaruhi Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman	30
Bab 3 Ruang Lingkup Tugas & Wewenang Badan Kehakiman Sebagai Salah Satu Cabang Kekuasaan Negara	34
Penerapan Undang-Undang dalam Suatu Peristiwa Konkrit	34
Langkah-langkah Penerapan Undang-undang terhadap Peristiwa Konkrit	46
Penemuan Hukum dalam Rangka Penyelesaian Kasus (Peristiwa Konkrit)	55
Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum	59
Konstruksi Hukum (Komposisi Hukum) dalam Rangka Penemuan Hukum	65

Wewenang Hakim dalam Menguji Peraturan Perundang-Undangan 73

Pengawasan Badan Judisial terhadap Pemerintah Melalui Peradilan Administrasi Negara 80

Bab 4 Politik Hukum Penguasa Kolonial Hindia Belanda dan Pluralisme Hukum dan Lembaga Peradilan 84

Politik Hukum Pemerintah Kolonial Belanda dan Pluralisme Hukum 84

Struktur Lembaga Peradilan Pada Masa Kolonial Hindia Belanda 88

Bab 5 Kekuasaan Kehakiman dan Struktur Badan Peradilan Pasca Kemerdekaan (Tahun 1945-1949) 96

Ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 96

Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1947 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 100

Bab 6 Kekuasaan Kehakiman dan Lembaga-lembaga Peradilan Pada Masa Republik Indonesia Serikat (1949-1950) 106

Kekuasaan Kehakiman dan Lembaga-Lembaga Peradilan Menurut Konstitusi RIS 106

Kedudukan Mahkamah Agung Sebagai Puncak Peradilan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 110

Bab 7 Kekuasaan Kehakiman dan Badan-badan Peradilan Menurut Undang-undang Dasar Sementara 1950 115

Kekuasaan Kehakiman dan Susunan Badan-badan Peradilan Menurut Undang-undang Dasar Sementara 1950 115

Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Agung Menurut UUDS 1950 dan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 117

Bab 8 Kekuasaan Kehakiman dan Badan-badan Peradilan Setelah Kembali Ke Undang-undang Dasar 1945 (Periode 1959-1965) 122

Kekuasaan Kehakiman dan Badan-badan Peradilan Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 Pada Periode 1959-1965 122

Kekuasaan Kehakiman dan Badan-badan Peradilan Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Pada Periode 1970-1998 135

Bab 9 Reformasi dalam Rangka Perubahan Struktur Ketatanegaraan & Kekuasaan Kehakiman Melalui Amandemen Undang-undang Dasar 1945 148

Gerakan Reformasi dan Perubahan Struktur Ketatanegaraan 148

Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Keseimbangan dengan Cabang-cabang Kekuasaan Negara Setelah Amandemen Ketiga UUD 1945 161

Kedudukan Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan Menurut UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 171

Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Menurut UUD 1945 Amandemen Ketiga dan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 175

Daftar Pustaka 178



Hotma Pardomuan Sibuea

Lahir di Sibolga, Sumatera Utara, 23 Maret 1958. Pendidikan SD sampai dengan SMU diselesaikan di Sumatera Utara. Alumni Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta tahun 1985 ini menyelesaikan Program Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran pada tahun 2001. Sejak tahun 2004 menempuh program doktor pada Universitas PELITA HARAPAN

Jakarta dan sekarang sedang menulis disertasi tentang Dewan Perwakilan Daerah di bawah bimbingan Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. (promotor) dan Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. (co-promotor).

Jabatan-jabatan struktural yang pernah dijabat adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (Tahun 2002-2005), Pembantu Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

Sebagai dosen sudah mengajar sejak tahun 1986 selama kurang lebih 21 tahun sampai dengan sekarang. Jabatan akademik terakhir adalah LEKTOR KEPALA dan sekarang merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Di samping itu pernah dan menjadi dosen luar biasa pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya Jakarta, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta dan beberapa fakultas hukum swasta lainnya.

Beberapa mata kuliah yang diasuh dan pernah diasuh antara lain adalah Pengantar Ilmu Hukum, Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Kekuasaan Kehakiman, Metode Penelitian Hukum dan Teknik Penulisan Karya Ilmiah.

Beberapa kali melakukan penelitian dan pengkajian hukum dengan instansi pemerintah seperti Pemerintah DKI Jakarta dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Selain itu melakukan penelitian-penelitian mandiri yang dimuat dalam jurnal-jurnal fakultas hukum swasta.